

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem demokrasi disuatu negara selalu membahas terkait dengan adanya sebuah pemilihan umum atau pemilu, dalam sebuah pemilu juga tidak terlepas dengan adanya kehadiran peran perempuan. Kehadiran perempuan dalam perpolitikan diharapkan menjadi peran penting dalam sebuah proses pengambil keputusan kebijakan, tanpa adanya keterwakilan perempuan yang memadai di lembaga legislatif memberikan dampak yang cukup krusial terhadap hal perpolitikan, baik itu berupa kebijakan maupun keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Adanya peran perempuan yang cukup dalam lembaga legislatif dapat membalikkan kecenderungan kepentingan laki-laki di sebuah lembaga.

Kurangnya peran perempuan dalam sebuah lembaga pengambil keputusan di Indonesia menjadi permasalahan utama, apalagi disaat transisi menuju negara yang demokratis dengan mensyaratkan kesetaraan dan hak bagi perempuan. Tatanan sosial budaya yang ada dimasyarakat seperti dengan buaya patriarki menjadi faktor penghambat terwujudnya perempuan sebagai pengambil keputusan dalam pembangunan bangsa. Upaya peningkatan partisipasi politik dari seorang perempuan haruslah menjadi point penting dinegara Indonesia sebagai bentuk negara yang

berbangsa dan bernegara jikalau Indonesia mau membuat sebuah sistem politik negara yang demokratis.¹

Beberapa upaya telah diterapkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam sebuah pemilu, khususnya lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD maupun DPD. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan kehadiran UU Nomor 10 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang kebijakan afirmasi (*affirmative action*), menjadi faktor dalam mempertimbangkan 30% keterwakilan politik perempuan, hal tersebut memberikan peluang dan memberikan jalam bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ikut serta pada pemilihan umum.

Berbicara mengenai partisipasi politik perempuan di Indonesia, maka problem soal besar kecilnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat ditentukan dan tergantung dari parpol. Artinya bahwa parpol mempunyai posisi penting dalam rangka rekrutmen dan kandidasi terhadap politisi perempuan. Dalam konteks ini, parpol selalu dianalogikan sebagai gatekeeper, yaitu institusi politik yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan seleksi dan kandidasi terhadap politisi perempuan.² Oleh karena itu, proses rekrutmen dan pencalonan semestinya memberikan hak, kesempatan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dan dicalonkan oleh partai politik. Akan tetapi, realitas

¹ Loura Hardjaloka, 2012. Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2. Jakarta Barat.

² Norris, P & Lovenduski, J, 1995. *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament*. London: Cambridge University Press

dunia politik sering mengabaikan masalah, kebutuhan dan aspirasi kaum perempuan karena dianggap hal itu sebagai wilayah privat, bukan sebagai ranah formal. Misalnya, masalah pelabelan perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang hanya berkuat pada wilayah domestik menjadi salah satu penyebab perempuan sulit masuk ke wilayah politik.³

Menyoroti tentang partisipasi dan keterlibatan aktif kaum perempuan dalam kehidupan politik menjadi hal penting dalam implementasi sistem demokrasi di suatu negara. Keikutsertaan kaum perempuan dalam pemilihan umum, bukan hanya berpartisipasi aktif sebagai pemilih melainkan juga berpartisipasi aktif dan langsung melibatkan diri di dalam kontestasi pemilihan tersebut, seperti menjadi calon Gubernur, DPR, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan lembaga dan posisi politik strategis lainnya.

Terlebih dalam kasus perbandingan antara pemilu 2009 dan 2014 yang menunjukkan adanya tren menurun keterwakilan perempuan di DPR juga memberikan realitas bahwa perlunya perubahan setiap periode pemilu dalam hal ini kebijakan dan peraturan politik hukum yang mengatur mengenai keterwakilan ini. Jika dibandingkan angka keterwakilan politik perempuan Indonesia dengan dunia masih tertinggal jauh, dimana perbandingan antara 19,80% untuk Indonesia dan 23,60% untuk dunia.

³ Eusabius Separera Niron, Asterius Bata Seda, 2021. Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* Vol.09, No.2. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Namun, dalam skala Asia dan Asia Tenggara, keterwakilan politik perempuan Indonesia masih dibidang cukup tinggi. Dari fenomena di atas memberikan analisis serta solusi terhadap kehadiran dan keterwakilan politik perempuan. Upaya yang dilakukan sebenarnya berorientasi dalam pendidikan politik dan sosialisasi politik sedari dini dan dalam lingkup awal pada keluarga. Di samping memperbaiki kualitas regulasi dan kebijakan untuk mendongkrak keterwakilan perempuan, keterlibatan partai politik sebagai wadah dan jembatan perempuan dalam memasuki lembaga perwakilan juga dituntut untuk lebih berperan aktif dan kritis.

Kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan menjadi point penting dalam tatanan kehidupan saat ini, konsep inilah yang menjadi upaya dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan di ranah publik dan politik. Kehadiran kaum perempuan di tengah publik dan menjadi suatu tokoh maupun sebagai perwakilan dan pemimpin menjadi faktor krusial dalam menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi kaum perempuan. Konstruksi dari sistem budaya dan sosial yang selama ini mengkerdilkan keterlibatan perempuan yang mengakibatkan keterwakilan perempuan dan persepsi terhadap perempuan tersebut menjadi terabaikan.

Fenomena di atas memberikan analisis serta solusi terhadap kehadiran dan keterwakilan politik perempuan. Upaya yang dilakukan sebenarnya berorientasi dalam pendidikan politik dan sosialisasi politik sedari dini dan dalam lingkup awal pada keluarga. Di samping memperbaiki kualitas regulasi dan kebijakan untuk mendongkrak keterwakilan perempuan, keterlibatan partai politik sebagai wadah dan jembatan

perempuan dalam memasuki lembaga perwakilan juga dituntut untuk lebih berperan aktif dan kritis.

Sebenarnya telah banyak studi yang dikaji oleh peneliti yang menjelaskan terkait dengan partisipasi perempuan, seperti dalam tulisan Fredik Lambertus Kollo tentang budaya patriarki dan partisipasi perempuan dalam politik yang menjelaskan gambaran umum terkait dengan faktor-faktor rendahnya perempuan ikut dalam politik dengan adanya sebuah pengaruh budaya patriarki.⁴ Konsep tersebut berhubungan dengan yang terjadi di Kecamatan Siau Barat Selatan bahwa pemilih hanya memilih perempuan dalam pemilu legislatif berdasarkan informasi diterima baik berupa lingkungan maupun hubungan masyarakat.⁵

Partisipasi perempuan di dalam politik cukup terbilang rendah, rendahnya partisipasi tersebut karena terdapat beberapa faktor seperti dengan faktor dari sudut pandang pemilih, sudut pandang dari perempuan latar belakang calon sebagai anggota legislatif maupun faktor partai politik itu sendiri yang kurang berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya.

Terdapat beberapa aspek dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, seperti dari segi budaya politik dan juga minimnya sosialisasi partai politik, serta sosialisasi dari perempuan yang mencalonkan diri sangat minim di hadapan masyarakat

⁴ Fredik Lambertus Kollo, 2017. Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan*. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

⁵ Vandyk Lumiu, 2015. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Siau Barat Selatan. *Politico Jurnal Ilmu Politik*. Universitas Sam Ratulangi.

pada pemilihan umum legislatif 2019, hal ini sangat berdampak kepada masyarakat yang kurang yakin akan pilihan mereka dalam memilih seorang perempuan pada pemilu legislatif 2019.⁶

Selain permasalahan keterwakilan politik pada pemilu legislatif terdapat juga beberapa penelitian yang juga membahas tentang partisipasi perempuan dalam politik seperti yang dilakukan oleh Fiska Darmawan Putri yang membahas tentang partisipasi perempuan pada pemilu 2019 di Kota Tengah Kota Padang yang melihat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dari segi partisipasi pemilih perempuan dalam pileg tahun 2019.⁷

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dikarenakan peneliti disini lebih membahas maupun memfokuskan penelitian kepada faktor-faktor penyebab perempuan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, serta mencari terkait tentang hal yang mendasari latar belakang perempuan mencalonkan diri sebagai caleg tahun 2019 di Kota Sungai Penuh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di latar belakang dijelaskan diatas membuat peneliti ingin mencari lebih jauh terkait dengan penelitian tentang partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif yang ada di Kota Sungai Penuh. Penjelasan terkait

⁶ Wenni Atika Rahayu Efendi, Syafri Juana, 2020. Analisis keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, Vol 2 No 7.

⁷ Fiska Darmawan Putri, 2021. Partisipasi Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. *Diploma thesis*, Universitas Andalas.

dengan Kota Sungai Penuh itu sendiri, Kota Sungai Penuh adalah sebuah kota yang terdapat di Provinsi Jambi yang memiliki luas daerah 390,51 km² dengan luas tersebut Kota Sungai Penuh dibagi menjadi 8 Kecamatan. Delapan Kecamatan tersebut terbagi atas beberapa desa dengan kelurahan dengan jumlah total populasi pada tahun 2017 lalu yaitu sebanyak 103.511 jiwa.⁸

Melihat bagaimana pelaksanaan sebuah pemilihan umum legislatif 2019 terkhususnya yang ada pada Kota Sungai Penuh menyisakan banyak fenomena politik, salah satunya adalah terkait dengan partisipasi politik perempuan. Peneliti memfokuskan penelitian ini terkait alasan mengapa perempuan mau mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif dalam sebuah pileg 2019 di Kota Sungai Penuh.

Tabel 1. 1

Jumlah Daftar Caleg dari Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Sungai Penuh

NO	PARTAI	DAPIL			JUMLAH	
		1	2	3	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PKB	6	5	2	8	5
2	GERINDRA	10	8	6	15	9
3	PDI-P	6	3	6	10	5
4	GOLKAR	6	9	-	10	5
5	NASDEM	7	7	5	11	8
6	GARUDA	-	-	-	-	-
7	PARTAI BERKARYA	7	3	4	8	6
8	PKS	10	8	6	16	8
9	PERINDO	4	6	-	4	6
10	PPB	10	7	6	15	8
11	PSI	-	-	-	-	-
12	PAN	10	9	6	17	8
13	HANURA	5	7	4	9	7

⁸ Sungaipenuhkota.bps.go.id/, diakses pada tanggal 25/02/2021, Pukul 10.05

14	DEMOKRAT	10	9	6	17	8
15	BULAN BINTANG	4	2	-	2	4
16	PKPI	3	2	-	3	2
JUMLAH		98	85	51	145	89

Sumber : diolah dari data KPU Kota Sungai Penuh

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari beberapa partai politik memiliki calon perempuan untuk dicalonkan menjadi calon anggota legislatif pada pileg, dalam artian perempuan memiliki hak yang sama dalam konteks politik dengan kaum laki-laki. Tabel tersebut juga dijelaskan bahwasanya secara umum di Kota Sungai Penuh partai politik yang ada telah menjalankan kebijakan afirmasi yang dibuat oleh pemerintah. Meskipun dalam segi pencalonan telah mencukupi tetapi dalam keterpilihan caleg perempuan yang ada di Kota Sungai Penuh cukup terbilang sangat rendah sekali dalam Provinsi Jambi. Berikut data terkait dengan jumlah anggota DPRD yang terpilih dalam setiap periode pemilu di Provinsi Jambi berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1. 2

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan jenis kelamin di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No	Wilayah DPRD	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah		
		2009	2014	2019	2009	2014	2019	2009	2014	2019
1	Kerinci	28	27	27	2	3	3	30	30	30
2	Merangin	29	35	35	1	0	0	30	35	35
3	Sarolangun	27	32	32	3	3	2	30	35	34
4	Batang Hari	25	26	29	5	6	6	30	32	35
5	Muaro Jambi	29	30	30	6	5	5	35	35	35
6	Tanjung Jabung Timur	27	0	24	3	0	6	30	0	30
7	Tanjung Jabung Barat	29	30	30	1	5	5	30	35	35
8	Tebo	29	30	30	1	5	5	30	35	35
9	Bungo	28	28	29	2	2	6	30	30	35
10	Jambi	41	38	37	4	7	8	45	45	45

11	Sungai Penuh	19	25	25	1	0	0	20	25	25
12	Provinsi Jambi	40	48	46	5	7	8	45	55	54
	Jumlah	351	348	374	33	34	54	385	391	428

Sumber : diolah dari data KPU Kota Sungai Penuh

Tabel 1.2 dijelaskan bahwa dari pemilihan umum pada tahun 2009, 2014 serta 2019 keterwakilan perempuan yang terpilih ataupun yang duduk menjadi anggota DPRD Kota Sungai Penuh sangat rendah atau menurun dari periode sebelumnya sampai periode sekarang. Dalam tabel yang dijelaskan diatas bahwa perempuan yang mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif dari tahun 2009 sampai tahun 2019 mengalami penurunan yang duduk sebagai anggota DPRD di Kota Sungai Penuh,.

Dalam tabel diatas juga menjelaskan bahwa, meskipun kebijakan *affirmative action* telah dilaksanakan oleh partai politik tetapi tidak terealisasi dengan baik. Alasan perempuan mencalonkan diri sebagai caleg dalam pemilu hanya pemenuhan kuota menjadi salah satu asumsi dari peneliti, rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik memiliki aspek terutama pada pemenuhan kuota oleh partai politik agar partai tersebut dapat lolos mengikuti pemilihan umum, tidak hanya tersebut pengkaderan dari partai politik cenderung dikatakan kurang terhadap perempuan sehingga masyarakat tidak yakin akan memilih perempuan agar dapat duduk di lembaga legislatif. Hal seperti itu disampaikan oleh Nuraisah selaku caleg Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 dari partai Demokrat, ia menyatakan bahwa:⁹

“Faktor yang paling utama perempuan mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif yaitu adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang 30%

⁹ Wawancara dengan Nuraisyah selaku calon anggota legislatif pada pileg 2019 Kota Sungai Penuh, dilakukan dirumah kediaman pada tanggal 17 September 2021, Pukul 20.00 WIB.

itu, maka dikarenakan itu perempuan banyak dijadikan sebagai kader politik sehingga partai politik tersebut dapat lolos menjadi salah satu peserta dalam pemilihan umum legislatif. Tidak hanya permasalahan itu kader perempuan juga memiliki kekurangan sehingga menimbulkan kepemilihan dirinya berkurang dari masyarakat”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Yopi Reri Putriani, caleg dari Partai PKS terkait dengan pengkaderan dari partai politik saat ini sangat kurang, beliau mengungkapkan bahwa:¹⁰

“Kaderisasi terhadap perempuan pada saat itu sangat kurang terlebih lagi pada pemilihan umum legislatif, partai politik hanya mencari kader-nya saja untuk mau dicalonkan sebagai anggota legislatif tetapi partai tidak melakukan pengkaderan sesuai mestinya. Seharusnya yang dilakukan oleh partai politik itu harus melakukan pengkaderan sebelum adanya pemilihan umum sehingga perempuan dapat mempersiapkan diri mereka dalam sebuah pemilihan, hal tersebutlah yang dapat meyakinkan masyarakat dapat memilih kita”

Gambaran hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa alasan utama perempuan ikut dalam politik terkhususnya dalam partai politik hanya sebagai untuk pemenuhan kuota 30% sehingga partai dapat lolos dalam sebuah pemilihan, hal tersebut memberikan dampak sehingga masyarakat tidak yakin untuk memilih perempuan. Pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik juga sangat kurang, alasan tersebut-lah yang mendasari kurangnya persiapan perempuan dalam mensosialisasikan diri sendiri ke masyarakat, hal tersebut memberikan kepada keterpilihan masyarakat yang kurang memilih perempuan dalam kursi DPRD yang ada di Kota Sungai Penuh.

¹⁰ Wawancara dengan Yopi reri Putriani, salah satu caon anggota legislatif dari Partai PKS Kota Sungai Penuh, dilakukan di rumah informan, pada tanggal 20 September 2021, pukul 10.00 WIB.

Sebelum memasuki keterpilihan masyarakat latar belakang pencalonan merupakan sesuatu yang sangat harus dikaji hal tersebut lah yang mendorong peneliti untuk membahas terkait dengan alasan perempuan mau mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilihan umum legislatif. Jadi disini peneliti mencari tahu tentang alasan perempuan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum 2019 yang ada di Kota Sungai Penuh. Berdasarkan asumsi peneliti, dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu apa faktor-faktor yang mendasari perempuan ikut berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2019 di Kota Sungai Penuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang telah dijelaskan maka tujuan pada penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab perempuan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan umum 2019 di Kota Sungai Penuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat serta memberikan penjelasan khususnya terkait dengan faktor penyebab partisipasi perempuan

dalam politik yang terkhususnya membahas terkait dengan latar belakang pencalonan seorang perempuan. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan informasi penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya yang mengkaji tentang partisipasi perempuan dalam politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapatkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan bahan pemikiran ataupun bahan pertimbangan untuk perempuan yang akan mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif pada sebuah pemilihan umum.

